E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Grounded Theory Dalam Penelitian Kebijakan Publik: Tinjauan Sistematis Atas Variasi Pendekatan Dan Implikasinya Bagi Studi Kebijakan Publik

Riza Puji Wahyuni[1]
[1]Universitas Airlangga, rizawahyuni010@gmail.com

Abstrak

Grounded Theory merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang berfokus pada pengembangan teori berdasarkan data empiris. Seiring perkembangannya, Grounded Theory mengalami berbagai modifikasi yang melahirkan beragam variasi pendekatan dengan karakteristik metodologis dan landasan filosofis yang berbeda. Namun demikian, kajian yang membahas relevansi berbagai variasi Grounded Theory dalam penelitian kebijakan publik masih relatif terbatas. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan Grounded Theory serta menganalisis relevansi berbagai variasi pendekatannya dalam penelitian kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan menelaah berbagai literatur yang membahas perkembangan Grounded Theory, variasi pendekatannya, serta penerapannya dalam studi kebijakan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa setiap variasi Grounded Theory memiliki karakteristik dan fokus analisis yang berbeda sehingga menawarkan kontribusi yang beragam dalam penelitian kebijakan publik. Emergent Grounded Theory relevan untuk mengeksplorasi isu kebijakan yang masih berkembang, Systematic Grounded Theory sesuai untuk menganalisis proses kebijakan, Constructivist Grounded Theory bermanfaat untuk memahami makna dan persepsi aktor kebijakan, sedangkan Situational Grounded Theory mampu menjelaskan hubungan antara aktor, institusi, dan struktur dalam sistem kebijakan. Selain itu, perkembangan Grounded Theory dalam studi kebijakan publik juga menghasilkan kerangka analisis yang lebih sistematis melalui integrasi Grounded Theory, Soft Systems Methodology, dan Policy Subsystem Framework. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai variasi Grounded Theory menjadi penting untuk membantu peneliti memilih pendekatan yang sesuai dengan karakteristik fenomena kebijakan yang diteliti.

Kata Kunci: *Grounded Theory, Kebijakan Publik, Penelitian Kualitatif*

Abstract

Grounded Theory is a qualitative research method that focuses on generating theory from empirical data. Over time, Grounded Theory has undergone significant developments, resulting in various methodological approaches with distinct philosophical foundations and analytical characteristics. However, studies examining the relevance of these different Grounded Theory approaches within public policy research remain limited. This article aims to review the development of Grounded Theory and analyze the relevance of its various approaches in public policy research. The study employs a literature review method by examining scholarly works on the evolution of Grounded Theory, its methodological variations, and its application in public policy studies. The findings indicate that each variation of Grounded Theory offers unique analytical strengths and contributes differently to public policy research. Emergent Grounded Theory is particularly relevant for exploring emerging policy issues, Systematic Grounded Theory is suitable for analyzing policy processes, Constructivist Grounded Theory is useful for understanding the meanings and perceptions of policy actors, while Situational Grounded Theory enables researchers to examine the relationships among actors, institutions, and structures within policy systems. Furthermore, the development of Grounded Theory in public policy studies has led to more systematic analytical frameworks through the integration of Grounded Theory, Soft Systems Methodology, and the Policy Subsystem Framework. Therefore, understanding the various approaches to Grounded Theory is essential for helping researchers select the most

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

appropriate methodological approach based on the characteristics of the policy phenomenon under investigation.

Keywords: *Grounded Theory, Public Policy, Qualitative Research*

Corresponding Author:
Riza Puji Wahyuni

Universitas Airlangga, rizawahyuni010@gmail.com

PENDAHULUAN

Grounded Theory (GT) merupakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada pembentukan teori secara sistematis. Dalam metode ini penelitian diawali dengan pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara bertahap untuk mengidentifikasi permasalahan, memahami pola yang muncul, dan diakhiri dengan menemukan solusi dari fenomena yang diteliti. Hasil yang didapatkan melalui metode ini berupa hipotesis atau konsep teoritis yang dapat digunakan untuk menjelaskan suatu kondisi atau perilaku tertentu berdasarkan fakta empiris yang ditemukan selama proses penelitian (B. Artinian et al., 2009). Metode ini dikembangkan oleh Barney Glaser dan Anselm Strauss untuk mengembangkan teori dari data empiris di lapangan (Aslipour & Zargar, 2022). Selain itu, GT dikembangkan untuk menggabungkan ketelitian ilmiah dengan kereativitas analitis dan imajinasi dari peneliti sepanjang proses penelitian (B. G. Glaser et al., 1968).

Perkembangan dunia pengetahuan menyebabkan GT berkembang menjadi berbagai variasi yang disesuaikan dengan landasan filosofis, orientasi teoritis, hingga fokus penelitian (Aslipour & Zargar, 2022). Para peneliti mengembangan variasi GT berdasarkan fokus bidang studi masing-masing untuk mengakomodasi kebutuhan dan persoalan setiap studi (Bryant & Charmaz, 2010). Hal ini menjadikan GT sebagai metodologi yang fleksibel dan dapat digunakan secara luas dalam berbagai disiplin ilmu, tidak terkecuali penelitian kebijakan dan administrasi publik. Sebagai bagian dari penelitian kualitatif, GT diposisikan sebagai pendekatan induktif yang fokus pada pola, tema, dan kategori analitis dari data yang diteliti daripada kerangka teoritis yang telah digunakan penelitian sebelumnya (Corbin & Strauss, 2014). Oleh karena itu, teori dari GT berkembang secara progresif melalui interpretasi peneliti berdasarkan data empiris yang ditemukan di lapangan.

Meskipun Grounded Theory telah berkembang menjadi berbagai variasi metodologis, pembahasan mengenai relevansi masing-masing variasi tersebut dalam penelitian kebijakan publik masih relatif terbatas. Sebagian besar kajian membahas Grounded Theory sebagai satu pendekatan yang bersifat umum tanpa menjelaskan perbedaan karakteristik, landasan filosofis, serta implikasi metodologis dari setiap variasi Grounded Theory ketika diterapkan dalam studi kebijakan publik. Akibatnya, peneliti seringkali mengalami kesulitan dalam menentukan pendekatan Grounded Theory yang paling sesuai dengan tujuan dan karakteristik penelitian kebijakan yang dilakukan.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan Grounded Theory serta menganalisis relevansi berbagai variasi pendekatan Grounded Theory dalam penelitian kebijakan publik. Melalui metode literature review, artikel ini membahas sejarah perkembangan Grounded Theory, karakteristik setiap variasi pendekatan, serta implikasi penggunaannya dalam memahami fenomena kebijakan publik yang kompleks.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan naratif (narrative literature review). Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mensintesis berbagai literatur yang membahas perkembangan Grounded Theory serta penggunaannya dalam penelitian kebijakan publik. Literature review dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan konsep, variasi pendekatan, dan implikasi metodologis Grounded Theory dalam berbagai konteks penelitian (Snyder, 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dari buku akademik dan artikel jurnal ilmiah yang membahas Grounded Theory, metodologi penelitian kualitatif, Soft Systems Methodology, dan studi kebijakan publik. Literatur dipilih berdasarkan relevansi substansi terhadap fokus penelitian, khususnya karya-karya yang menjelaskan perkembangan Grounded Theory sejak diperkenalkan oleh Glaser dan Strauss hingga berbagai variasi kontemporer seperti Systematic Grounded Theory, Constructivist Grounded Theory, dan Situational Grounded Theory.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui proses identifikasi konsep, kategorisasi tema, dan sintesis teoritis untuk menemukan hubungan antara perkembangan Grounded Theory dan kebutuhan metodologis dalam penelitian kebijakan publik. Hasil sintesis digunakan untuk menjelaskan karakteristik masing-masing variasi Grounded Theory serta relevansinya dalam memahami fenomena kebijakan publik yang kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Grounded Theory dalam Penelitian Kualitatif

Grounded Theory (GT) pertama kali dikembangkan oleh Glaser dan Strauss pada tahun 1960-an dalam buku The Discovery of Grounded Theory yang menandai adanya pergeseran dalam perkembangan metodologi penelitian kualitatif, khususnya dalam ilmu sosial. Awalnya, penelitian dalam ilmu sosial didominasi oleh teori-teori mapan dengan pendekatan yang bersifat deduktif dengan fokus untuk melakukan verifikasi teori (B. M. Artinian, 2009). Sebagai respons terhadap fenomena ini, Barney Glaser dan Anselm Strauss mengembangkan GT sebagai metode yang sistematis, induktif, dan komparatif untuk menciptakan teori yang berdasarkan pada data empiris. GT berfokus untuk menciptakan konsep baru dan hubungan yang teoritis melalui interaksi dari data yang ditemukan di lapangan (B. Glaser & Strauss, 2017).

Landasan akademis pengembangan GT berasal dari latar belakang yang berbeda. Strauss sangat dipengaruhi oleh Chicago School, interaksionisme simbolik, dan filsafat pragmatis (Hallberg, 2006; Walker & Myrick, 2006). Sebaliknya, Glaser lebih banyak terpapar penelitian kuantitatif dan pengaruh metodoligis Paul Lazarsfeld terkait dengan pengembangan konsep, analisis komparatif konstan, dan identifikasi kategori. Meskipun berasal dari latar belakang akademis yang berbeda namun Glaser & Strauss mengembangkan GT sebagai metode yang muncul secara induktif dari data empiris yang dianalisis secara sistematis, bukan hanya asumsi deduktif.

Sejak dipublikasikan, GT menjadi salah satu metodologi paling berpengaruh karena fleksibilitas metodologi dan kemampuan untuk menghasilkan penjelasan berbasis data empiris. Lebih lanjut, perkembangan GT telah menghasilkan berbagai aliran dan variasi metodologis. Hal ini mencerminkan evolusi tradisi penelitian kualitatif yang terus berkembang.

Variasi Grounded Theory

Grounded Theory (GT) diperkenalkan sebagai inovasi dalam metodologi penelitian kualitatif untuk menciptakan teori berdasarkan data melalu analisis yang komperatif. GT

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

menjadikan peneliti sebagai bagian dari proses penelitian dengan ciri utama adalah melakukan perbandingan secara konstan, pengambilan sampel secara teoritis, iterasi yang dinamis dalam pengumpulan dan analisis data (Dunne, 2011). Sejak ditemukan hingga sekarang, GT setidaknya memiliki lima jenis berdasarkan fase perkembangannya :

1. Emergent GT merupakan GT yang pertama kali dikembangkan oleh Glaser dan Strauss. Emergent GT menekankan pada penggunaan kode dan kategori secara langsung dari data (Glaser & Strauss, 2017). Emergent GT merupakan metodologi kualitatif induktif yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi Perhatian utama dari kelompok subjek dan perilaku yang digunakan untuk menyelesaikan perhatian utama tersebut. Hasil dari identifikasi ini berupa teori yang diberi nama oleh peneliti sesuai dengan frasa yang dapat menggambarkan pengalaman dari subjek. Design dari GT dilakukan dengan pengumpulan data berupa wawancara kualitatif yang tidak terstruktur dan observasi partisipan. Namun, penggunaan sumber lain seperti jurnal, dokumen formal, dan literatur review masih dapat digunakan namun harus ditambahkan dalam kumpulan data berbentuk memo (Artinian et al 2009).
2. Classic GT, pertama kali dikembangkan oleh Strauss pada 1980-an dalam bukunya Qualitative Analysis for Social Scientists yang menekankan pada penggunaan pragmatisme Amerikan dalam proses penelitian menggunakan GT Strauss dalam Classic GT menerapkan pragmatism Amerika dalam tiga elemen analisis yaitu tindakan, struktur, dan proses. Melalui tiga elemen ini peneliti tidak hanya menunggu teori muncul dari data secara pasif namun juga melakukan analisis bagaimana tindakan aktor sosial dapat dibentuk oleh kondisi struktural, dan bagaimana keduanya dapat berubah dan berkembang dalam proses yang dinamis dan berkelanjutan (Aslipour & Zargar, 2022).
3. Systematic GT, pertama kali diperkenalkan oleh Strauss dan Corbin yang menyediakan prosedur dalam pengkodean data kualitatif dalam analisis konten. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan coding untuk memperoleh hasil yang terstruktur dan mudah dipahami. Tahap pertama diawali dengan open coding, yaitu proses untuk mengidentifikasi dan menyederhanakan data menjadi bagian kecil untuk menemukan tema atau kategori. Tahap kedua dilakukan axial coding, yaitu tahap menghubungkan kategori-kategori sebelumnya untuk melihat hubungan sebab akibat atau pola tertentu. Tahap terakhir, yaitu selective coding dilakukan dengan memilih kategori utama yang kemudian disusun sebagai inti pembahasan atau teori penelitian secara keseluruhan. Selain tiga tahap diatas, peneliti juga dapat menggunakan triangulasi untuk memastikan validitas data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber seperti wawancara, dokumen, dan observasi (Rahimi-Feyzabad et al., 2021).
4. Constructivist GT, diperkenalkan oleh Charmaz dan Bryant fokus pada pencarian pola dan makna dari hasil informasi yang diperoleh. Dalam prosesnya peneliti tidak hanya mengumpulkan data begitu saja, namun juga membandingkan berbagai informasi dan melakukan interpretasi terhadap data yang ada. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang mendalam (Aslipour & Zargar, 2022). Dalam constructivist GT, penelitian dilakukan dengan wawancara yang bersifat fleksibel dan terbuka dengan terus menggali tema tema yang belum tereksplorasi agar dapat mengembangkan pemahaman dan konsep secara bertahap (Torelli & Puddephatt, 2021).
5. Postmodern Situasional GT, diperkenalkan oleh Clarke Widens dengan tujuan untuk memperluas cakupan penelitian GT dari yang hanya berfokus pada aktor dan perspektif individu berkembang menjadi berbagai elemen lain seperti praktik sosial, institusi, hingga struktur yang melingkupinya. Metode ini dimulai dengan melakukan pemetaan situasi (situasional mapping) untuk dapat mengidentifikasi aktor, struktur, serta berbagai faktor lain yang saling berkaitan sehingga analisis yang dihasilkan menjadi lebih

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

komprehensif karena mampu menggambarkan kompleksitas elemen yang terkait (Aslipour & Zargar, 2022).

Dapat dilihat bahwa tiga jenis pertama dari perkembangan GT merupakan hasil dari pengembangan Glaser dan Strauss. Perkembangan ini muncul sebagai hasil dari perbedaan cara pandang keduanya terhadap bagaimana teori seharusnya dibangun dari data penelitian (Dunne, 2011). Perbedaan utama keduanya terletak pada bagaimana cara melakukan analisis. Glaser menekankan bahwa GT harus dilakukan secara, yaitu dengan membangun teori dari fakta-fakya khusus yang ditemukan dilapangan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat lebih umum. Berbeda dengan Glaser, Strauss dan Corbin menggunakan pendekatan abduktif, yaitu pendekatan yang menggabungkan pendekatan induktif dan deduktif. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya membangun teori dari data yang ada namun juga menggunakan konsep umum untuk dapat memahami data yang ditemukan. Strauss dan Corbin bertujuan untuk menghasilkan teori yang terstruktur dan dapat diuji secara sistematis dengan menekankan adanya proses verifikasi dalam proses penelitian (Heath & Cowley, 2004). Tetapi meskipun ada pertentangan, Glaser dengan Strauss dan Corbin sepakat bahwa penelitian yang menggunakan GT seringkali gagal dalam proses dasar coding, untuk mengatasi hal ini, Glaser memperkenalkan coding families, sedangkan

Meskipun terdapat pertentangan antara Glaser dengan Strauss dan Corbin, tetapi keduanya sepakat bahwa sebagian penelitian yang menggunakan GT seringkali gagal dalam proses coding dasar. Dalam mengatasi hal ini, Glaser menawarkan coding families, sedangkan Strauss dan Corbin mengembangkan coding paradigm.

Kebijakan Publik sebagai Sistem Sosial yang Kompleks

Definisi kebijakan publik sangat beragam tergantung dari aspek apa yang ditekankan. (Howlett & Ramesh, 2016) menjelaskan bahwa kebijakan publik muncul dari upaya masyarakat untuk memengaruhi perubahan dalam perilaku institusional atau perilaku public untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting oleh aktor utama kebijakan. Kebijakan tersebut ditetapkan oleh pemerintah dengan melibatkan aktor dan institusi lain. Definisi lain dapat ditelaah dalam (Dye & Dye, 1972) yang menjelaskan kebijakan publik sebagai sesuatu yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Namun, meskipun terdapat berbagai definisi, pada dasarnya proses perumusan kebijakan publik merupakan proses yang bersifat tekno-politis dengan tujuan untuk mencocokkan tujuan dan sarana oleh para pemangku kebijakan (Howlett et al., 1995).

Berdasarkan objek studi yang diteliti, studi kebijakan publik dapat dibagi menjadi dua yaitu studi analisis kebijakan (policy analysis) dan studi proses kebijakan (policy process). Studi analisis kebijakan (policy analysis) merupakan studi yang menjadikan kebijakan objek utama dalam kajian yang berusaha untuk mengidentifikasi elemen elemen dalam kebijakan tersebut, hubungan antar setiap eleman, dan menciptakan elemen baru. Berikutnya adalah studi proses kebijakan (policy process) adalah studi yang menjadikan proses kebijakan sebagai objek utama kajian. Studi ini bertujuan untuk memahami dinamikan dari proses perumusan kebijakan serta faktor-faktor yang berperan dalam proses perumusannya (Aslipour & Zargar, 2022).

Selain objek studi, dalam studi kebijakan publik juga dikenal istilah subsistem kebijakan. Subsistem kebijakan sendiri ditujukan untuk memengaruhi cara atau solusi yang dipilih oleh pemerintah untuk mengatasi suatu masalah atau fenomena dalam kebijakan publik (Howlett et al, 1995). Beberapa istilah yang dikenal dalam konsep subsistem kebijakan adalah whirlpools, sub-governments, policy communities, iron triangles, dan policy networks (Weible, 2008).

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Istilah-istilah untuk menggambarkan subsistem kebijakan seringkali dinilai memiliki makna yang sama, padahal terdapat perbedaan yang krusial dalam setiap konsep. Contohnya adalah konsep sub-government dan policy subsystem. konsep sub-government mengacu pada kelompok yang terlibat dalam proses pengambilan kebijakan disuatu bidang tertentu. Kelompok yang terlibat dalam konsep ini bisa merupakan anggota parlemen, para birokrat, ataupun staff pemerintahan. Konsep ini jauh sempit jika dibandingkan dengan policy subsystem. Kelompok yang dapat terlibat dalam policy subsystem dapat berasal dari otoritas non-formal baik dari kelompok swasta maupun public (Howlett et al, 1995).

Para ahli mengklasifikasikan unsur-unsur dalam subsistem kebijakan dengan berbagai cara. Walker (2000) membagi subsistem kebijakan dalam empat hal yaitu proses pembuatan kebijakan, domain sistem kebijakan, faktor eksternal, dan hasil kebijakan. Sementara itu Weible (2008) menambahkan unsur budaya, institusi dan aturan, kondisi sosial-ekonomi dan lingkungan, hubungan antaraktor, konstruksi sosial, hingga unsur kekuasaan dan otoritas. Kompleksitas unsur ini disederhanakan Howlett et al (1995) dalam tiga kerangka yaitu aktor, institusi, dan ide. Perpaduan antara aktor, institusi, dan ide pada akhirnya melahirkan berbagai gaya atau pola pembuatan kebijakan yang dalam literatur dikenal sebagai policy styles, modes, atau regimes (Howlett et al., 1995).

Kompleksitas dalam proses dan analisis kebijakan publik menjadikan studi ini tidak dapat hanya dipahami proses teknik, tetapi harus juga dilihat sebagai sistem sosial yang melibatkan berbagai pihak, relasi kekuasaan, dan kepentingan. Hal inilah yang menjadikan kebijakan publik tidak dapat hanya dianalisis dalam pendekatan tradisional yang melihat sistem secara objektif dan hanya menghasilkan solusi tunggal. Oleh karena itu, Checkland (1981) mengembangkan Soft Systems Methodology (SSM) sebagai pendekatan baru untuk memahami situasi sosial kompleks yang melibatkan interaksi antar kelompok sosial (Basden & Wood-Harper, 2006). SSM memandang sistem sosial sebagai hal yang perlu diinterpretasikan dalam perspektif, makna, dan pengalaman aktor yang terlibat. Beragamnya temuan dalam SSM akhirnya membuat tidak adanya solusi tunggal untuk suatu sistem sosial.

SSM merupakan pendekatan yang diniliai relevan dalam studi kebijakan publik karena pada dasarnya studi ini merupakan studi tentang sistem manusia yang dibentuk dalam interaksi antaraktor, negosiasi, hingga proses sosial-politik yang kompleks. Dalam SSM terdapat beberapa kerangka yang dapat digunakan untuk menganalisis sistem sosial, yaitu CATWOE, CCP, dan CPO. Kerangka pertama yaitu CATWOE adalah kerangka yang dikembangkan oleh Checkland dan Scholes. Melalui kerangka ini dapat dijelaskan enam elemen utama dalam sistem sosial yaitu customer, actor, transformation, worldview, owner, dan environment (Basden & Wood-Harper, 2006). Kerangka kedua yaitu CCP, CCP dikembangkan oleh Pettigrew (1985) dalam konsep Pettigrew Triangle. Melalui kerangka ini, Pettigrew menekankan pentingnya konteks dalam memahami sistem sosial dengan tiga elemen utama, yaitu context, content, dan process (Sminia & de Rond, 2012). Kerangka ketiga, yaitu CPO terdiri dari tiga elemen yaitu context, process, dan outcome (Fridrich et al., 2015). Perkembangan kerangka-kerangka ini mampu menjelaskan kebijakan publik secara holistik dan sistematis terhadap berbagai aspek sistem sosial.

Relevansi Grounded Theory dalam Penelitian Kebijakan Publik

Perkembangan Grounded Theory telah menghasilkan berbagai variasi pendekatan yang memiliki karakteristik metodologis dan landasan filosofis yang berbeda. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat satu pendekatan Grounded Theory yang dapat digunakan secara universal untuk seluruh penelitian kebijakan publik. Sebaliknya, setiap variasi Grounded Theory memiliki keunggulan dan relevansi tersendiri tergantung pada

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

tujuan penelitian, karakteristik fenomena kebijakan yang diteliti, serta jenis pengetahuan yang ingin dihasilkan oleh peneliti (Bryant & Charmaz, 2010).

Dalam konteks penelitian kebijakan publik, kompleksitas hubungan antara aktor, institusi, ide, kepentingan, dan proses politik menuntut penggunaan pendekatan metodologis yang mampu menangkap dinamika sosial secara mendalam (Howlett et al., 1995). Grounded Theory menjadi salah satu pendekatan yang relevan karena memungkinkan peneliti mengembangkan penjelasan teoritis berdasarkan pengalaman, interaksi, dan perspektif para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan. Namun demikian, karakteristik masing-masing variasi Grounded Theory menyebabkan perbedaan fokus analisis ketika diterapkan dalam penelitian kebijakan publik.

Emergent Grounded Theory yang diperkenalkan oleh Glaser dan Strauss menekankan munculnya teori secara alami dari data tanpa intervensi kerangka konseptual yang terlalu kuat. Pendekatan ini relevan digunakan dalam penelitian kebijakan yang bertujuan mengeksplorasi fenomena baru atau isu kebijakan yang belum banyak diteliti. Dalam studi kebijakan publik, pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana suatu isu berkembang menjadi agenda kebijakan, bagaimana aktor memaknai masalah publik yang muncul, serta bagaimana pola-pola sosial baru terbentuk dalam proses kebijakan.

Sementara itu, Systematic Grounded Theory yang dikembangkan oleh Strauss dan Corbin menawarkan prosedur analisis yang lebih terstruktur melalui tahapan open coding, axial coding, dan selective coding (Corbin & Strauss, 2014). Pendekatan ini sangat relevan dalam penelitian yang berfokus pada proses kebijakan (policy process), karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi hubungan antara kondisi, tindakan, interaksi, dan konsekuensi yang muncul selama proses formulasi maupun implementasi kebijakan. Struktur analisis yang sistematis juga membantu peneliti memahami hubungan kausal yang kompleks dalam suatu proses kebijakan.

Di sisi lain, Constructivist Grounded Theory yang dikembangkan oleh Charmaz berangkat dari asumsi bahwa realitas sosial merupakan hasil konstruksi makna yang dibangun melalui interaksi sosial (Charmaz, 2006). Dalam penelitian kebijakan publik, pendekatan ini relevan untuk mengkaji bagaimana aktor kebijakan memahami suatu masalah publik, membangun narasi kebijakan, serta membentuk persepsi terhadap suatu kebijakan. Oleh karena itu, Constructivist Grounded Theory banyak digunakan dalam penelitian yang berfokus pada interpretasi, framing kebijakan, serta proses pembentukan makna dalam ruang kebijakan publik.

Variasi lain yang berkembang adalah Situational Grounded Theory yang diperkenalkan oleh Clarke. Pendekatan ini memperluas analisis Grounded Theory dengan memasukkan elemen-elemen yang lebih luas seperti institusi, struktur sosial, relasi kekuasaan, wacana, serta aktor non-manusia yang memengaruhi suatu fenomena sosial. Dalam studi kebijakan publik, pendekatan ini relevan untuk menganalisis jaringan kebijakan (policy network), tata kelola kolaboratif (collaborative governance), serta interaksi kompleks antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses kebijakan. Kemampuan Situational Grounded Theory dalam memetakan hubungan antaraktor dan struktur menjadikannya sesuai untuk memahami kompleksitas kebijakan publik kontemporer.

Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa pemilihan variasi Grounded Theory dalam penelitian kebijakan publik perlu disesuaikan dengan fokus penelitian yang dilakukan. Penelitian yang bertujuan mengeksplorasi kemunculan isu kebijakan baru dapat memanfaatkan Emergent Grounded Theory, sementara penelitian yang berorientasi pada analisis proses kebijakan lebih sesuai menggunakan Systematic Grounded Theory. Di sisi lain, penelitian yang berfokus pada makna dan interpretasi aktor dapat menggunakan Constructivist Grounded Theory, sedangkan penelitian yang menekankan hubungan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

antaraktor, institusi, dan struktur kebijakan lebih sesuai menggunakan Situational Grounded Theory.

Dengan demikian, perkembangan berbagai variasi Grounded Theory memberikan fleksibilitas metodologis bagi peneliti kebijakan publik dalam memilih pendekatan yang paling sesuai dengan karakteristik fenomena yang diteliti. Keberagaman pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Grounded Theory tidak hanya berfungsi sebagai metode untuk membangun teori dari data, tetapi juga sebagai kerangka metodologis yang mampu menjelaskan berbagai dimensi kompleks dalam proses kebijakan publik.

Tabel 1. Relevansi Variasi Grounded Theory dalam Penelitian Kebijakan Publik

Variasi Grounded Theory	Tokoh Utama	Karakteristik Utama	Fokus Analisis dalam Kebijakan Publik	Contoh Topik Penelitian
Emergent Grounded Theory	Glases & Strauss	Teori muncul secara alami dari data tanpa kerangka konseptual yang terlalu ketat	Eksplorasi fenomena dan isu kebijakan baru	Kemunculan isu AI dalam agenda pemerintah, respon masyarakat terhadap kebijakan baru
Classic Grounded Theory	Glaser	Menekankan proses penemuan teori secara induktif dan minim intervensi peneliti	Pola perilaku dan interaksi aktor kebijakan	Perilaku birokrasi dalam implementasi kebijakan, adaptasi aktor terhadap regulasi baru
Systematic Grounded Theory	Strauss & Corbin	Analisis sistematis melalui open, axial, dan selective coding	Proses kebijakan (*policy process*) dan hubungan kausal	Formulasi kebijakan, implementasi kebijakan stunting, evaluasi program pemerintah
Constructivist Grounded Theory	Charmaz	Realitas dipandang sebagai konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi	Makna, persepsi, dan narasi kebijakan	Persepsi masyarakat terhadap IKN, framing kebijakan energi terbarukan, narasi kebijakan kesehatan
Situational Grounded Theory	Clarke	Memetakan aktor, struktur, wacana, dan relasi kekuasaan dalam suatu situasi	Makna, persepsi, dan narasi kebijakan	Tata kelola lingkungan, collaborative governance, jaringan aktor dalam kebijakan publik

Sumber: Diadaptasi dari Glaser & Strauss (1967), Corbin & Strauss (2014), Charmaz (2006), dan Clarke (2005).

Tabel 1 menunjukkan bahwa setiap variasi Grounded Theory memiliki fokus dan keunggulan yang berbeda dalam penelitian kebijakan publik. Variasi yang dikembangkan oleh Glaser lebih sesuai untuk mengeksplorasi fenomena kebijakan yang masih minim kajian teoritis, sedangkan pendekatan Strauss dan Corbin lebih relevan untuk menganalisis proses kebijakan yang melibatkan hubungan antara kondisi, tindakan, dan konsekuensi. Di sisi lain, pendekatan konstruktivis dan situasional menawarkan kemampuan untuk memahami dimensi makna, wacana, relasi kekuasaan, serta interaksi antaraktor yang semakin penting dalam studi kebijakan publik kontemporer. Oleh karena itu, pemilihan variasi Grounded Theory sebaiknya disesuaikan dengan tujuan penelitian dan karakteristik fenomena kebijakan yang dikaji agar mampu menghasilkan penjelasan teoritis yang lebih komprehensif.

Kerangka Penggunaan Grounded Theory dalam Penelitian Kebijakan Publik

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Perkembangan Grounded Theory dalam penelitian kebijakan publik mendorong munculnya berbagai upaya untuk mengadaptasi pendekatan tersebut ke dalam karakteristik studi kebijakan yang kompleks. Salah satu upaya tersebut dikembangkan oleh (Aslipour & Zargar, 2022) melalui integrasi antara Grounded Theory, Soft Systems Methodology (SSM), dan Policy Subsystem Framework. Integrasi tersebut bertujuan untuk menyediakan panduan yang lebih sistematis dalam menerapkan Grounded Theory pada penelitian kebijakan publik yang melibatkan berbagai aktor, institusi, ide, dan proses sosial-politik yang saling berinteraksi.

Menurut Aslipour dan Zargar (2022), penggunaan Grounded Theory dalam penelitian kebijakan publik dapat dipahami melalui enam subsistem utama, yaitu Context and Discourse, Content and Ideas, Policy Participants, Structure, Policy Process, serta Policy Outputs and Effects. Keenam subsistem tersebut membantu peneliti mengorganisasi data secara sistematis sekaligus mengidentifikasi hubungan antar elemen yang memengaruhi proses kebijakan.

Context and Discourse

Subsistem pertama adalah Context and Discourse yang merujuk pada lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi suatu kebijakan. Dalam penelitian kebijakan publik, konteks memiliki peran penting karena menentukan bagaimana suatu masalah dipahami, dibingkai, dan ditempatkan dalam agenda kebijakan. Selain itu, wacana yang berkembang di masyarakat maupun di kalangan pembuat kebijakan dapat memengaruhi cara suatu isu dikonstruksikan sebagai masalah publik yang membutuhkan intervensi pemerintah (Aslipour & Zargar, 2022).

Content and Ideas

Subsistem kedua adalah Content and Ideas yang mencakup gagasan, nilai, informasi, serta substansi yang terkandung dalam suatu kebijakan. Pada tahap ini, peneliti berupaya mengidentifikasi ide-ide utama yang mendasari kebijakan, asumsi yang digunakan oleh para pembuat kebijakan, serta bagaimana suatu solusi kebijakan dirumuskan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Analisis terhadap ide dan konten kebijakan menjadi penting karena kebijakan publik tidak hanya merupakan produk administratif, tetapi juga refleksi dari nilai dan kepentingan tertentu yang berkembang dalam masyarakat.

Policy Participants

Subsistem ketiga adalah Policy Participants yang berfokus pada aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijakan. Aktor tersebut dapat berupa pemerintah, legislatif, kelompok kepentingan, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, maupun masyarakat umum. Dalam perspektif Grounded Theory, interaksi antaraktor menjadi sumber data yang penting untuk memahami bagaimana kebijakan dibentuk, dinegosiasikan, dan diimplementasikan. Oleh karena itu, identifikasi peran, kepentingan, serta hubungan antaraktor menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari analisis kebijakan publik (Howlett et al., 1995).

Structure

Subsistem keempat adalah Structure yang mencakup aturan formal, norma, institusi, serta mekanisme yang mengatur proses kebijakan. Struktur berperan sebagai faktor yang dapat membatasi maupun memfasilitasi tindakan para aktor dalam proses kebijakan. Analisis terhadap struktur memungkinkan peneliti memahami bagaimana konfigurasi kelembagaan dan regulasi memengaruhi pilihan kebijakan yang diambil serta peluang terjadinya perubahan kebijakan.

Policy Process

Subsistem kelima adalah Policy Process yang berfokus pada dinamika proses kebijakan mulai dari agenda setting, formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, hingga evaluasi. Dalam konteks Grounded Theory, proses kebijakan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

dipahami sebagai rangkaian interaksi sosial yang berlangsung secara dinamis dan menghasilkan berbagai konsekuensi bagi para aktor yang terlibat. Oleh karena itu, analisis terhadap proses kebijakan memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola tindakan, strategi, serta mekanisme yang membentuk hasil kebijakan (Howlett & Ramesh, 2016).

Policy Outputs and Effects

Subsistem terakhir adalah Policy Outputs and Effects yang mencakup keluaran dan dampak kebijakan. Keluaran kebijakan (outputs) merujuk pada program, regulasi, atau keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah, sedangkan dampak (effects) merujuk pada perubahan yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut terhadap masyarakat maupun sistem sosial secara lebih luas. Analisis terhadap keluaran dan dampak kebijakan menjadi penting untuk memahami efektivitas kebijakan serta hubungan antara proses kebijakan dan hasil yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, kerangka yang dikembangkan oleh Aslipour dan Zargar (2022) menunjukkan bahwa penerapan Grounded Theory dalam penelitian kebijakan publik tidak hanya berorientasi pada pembentukan teori dari data, tetapi juga memperhatikan keterkaitan antara konteks, ide, aktor, struktur, proses, dan hasil kebijakan. Kerangka ini memberikan panduan yang sistematis bagi peneliti dalam mengorganisasi data empiris dan mengembangkan teori yang mampu menjelaskan kompleksitas fenomena kebijakan publik.

Meskipun kerangka yang dikembangkan oleh Aslipour dan Zargar menawarkan panduan yang komprehensif dalam penerapan Grounded Theory pada studi kebijakan publik, kerangka tersebut masih memerlukan pengujian lebih lanjut dalam berbagai konteks kebijakan dan sistem politik yang berbeda. Karakteristik kebijakan publik di negara berkembang, termasuk Indonesia, yang ditandai oleh kompleksitas kelembagaan, kapasitas birokrasi yang beragam, serta dinamika hubungan antara negara dan masyarakat dapat menghasilkan pola interaksi yang berbeda dibandingkan konteks tempat kerangka tersebut dikembangkan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diperlukan untuk menguji relevansi dan adaptabilitas kerangka tersebut dalam berbagai konteks kebijakan publik.

KESIMPULAN

Grounded Theory telah berkembang dari pendekatan yang diperkenalkan oleh Glaser dan Strauss menjadi berbagai variasi metodologis yang memiliki karakteristik dan fokus analisis yang berbeda. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Grounded Theory tidak lagi dipahami sebagai satu pendekatan yang tunggal, melainkan sebagai seperangkat metode yang dapat disesuaikan dengan tujuan dan konteks penelitian. Dalam penelitian kebijakan publik, setiap variasi Grounded Theory menawarkan relevansi yang berbeda sesuai dengan fokus kajian yang dilakukan. Selain itu, integrasi Grounded Theory dengan Soft Systems Methodology dan Policy Subsystem Framework yang dikembangkan oleh Aslipour dan Zargar (2022) menunjukkan upaya untuk mengadaptasi Grounded Theory ke dalam kompleksitas studi kebijakan publik. Oleh karena itu, pemilihan variasi Grounded Theory yang tepat menjadi penting agar mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Artinian, B., Giske, T., & Cone, P. (2009). Glaserian Grounded Theory in Nursing Research: Trusting Emergence. Springer Publishing Company. https://books.google.co.id/books?id=4q7_tAEACAAJ

Artinian, B. M. (2009). An overview of Glaserian grounded theory. Glaserian Grounded Theory in Nursing Research: Trusting Emergence, 3–17.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Aslipour, H., & Zargar, M. R. (2022). Developing Grounded Theory Systematic Approach for Public Policy Researches. International Journal of Qualitative Methods, 21. https://doi.org/10.1177/16094069221090357

Basden, A., & Wood-Harper, A. T. (2006). A philosophical discussion of the root definition in soft systems thinking: an enrichment of CATWOE. Systems Research and Behavioral Science, 23(1), 61–87. https://doi.org/10.1002/sres.689

Bryant, A., & Charmaz, K. (2010). The SAGE handbook of grounded theory: Paperback edition. Sage.

Corbin, J., & Strauss, A. (2014). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Sage publications.

Dunne, C. (2011). The place of the literature review in grounded theory research. International Journal of Social Research Methodology, 14(2), 111–124. https://doi.org/10.1080/13645579.2010.494930

Dye, T. R., & Dye, T. R. (1972). Understanding public policy (Vol. 1). Prentice-Hall Englewood Cliffs, NJ.

Fridrich, A., Jenny, G. J., & Bauer, G. F. (2015). The Context, Process, and Outcome Evaluation Model for Organisational Health Interventions. BioMed Research International, 2015, 1–12. https://doi.org/10.1155/2015/414832

Glaser, B. G., Strauss, A. L., & Beer, S. (1968). The discovery of grounded theory. na.

Glaser, B., & Strauss, A. (2017). Discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Routledge.

Hallberg, L. R.-M. (2006). The "core category" of grounded theory: Making constant comparisons. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being, 1(3), 141–148. https://doi.org/10.1080/17482620600858399

Heath, H., & Cowley, S. (2004). Developing a grounded theory approach: a comparison of Glaser and Strauss. International Journal of Nursing Studies, 41(2), 141–150. https://doi.org/10.1016/S0020-7489(03)00113-5

Howlett, M., & Ramesh, M. (2016). Chilles' heels of governance: Critical capacity deficits and their role in governance failures. Regulation & Governance, 10(4), 301–313. https://doi.org/10.1111/rego.12091

Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (1995). Studying public policy. Policy Cycles and Policy.

Rahimi-Feyzabad, F., Yazdanpanah, M., Gholamrezai, S., & Ahmadvand, M. (2021). Institutional constraints to groundwater resource management in arid and semi-arid regions: a Straussian grounded theory study. Hydrogeology Journal, 29(3), 925–947. https://doi.org/10.1007/s10040-020-02283-y

Sminia, H., & de Rond, M. (2012). Context and Action in the Transformation of Strategy Scholarship. Journal of Management Studies, 49(7), 1329–1349. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2012.01059.x

Snyder, H. (2024). Designing the literature review for a strong contribution. Journal of Decision Systems, 33(4), 551–558. https://doi.org/10.1080/12460125.2023.2197704

Torelli, J., & Puddephatt, A. (2021). Reframing "Dirty Work": The Case of Homeless Shelter Workers. Symbolic Interaction, 44(2), 310–338. https://doi.org/10.1002/symb.495

Walker, D., & Myrick, F. (2006). Grounded Theory: An Exploration of Process and Procedure. Qualitative Health Research, 16(4), 547–559. https://doi.org/10.1177/1049732305285972

Weible, C. M. (2008). Expert-Based Information and Policy Subsystems: A Review and Synthesis. Policy Studies Journal, 36(4), 615–635. https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2008.00287.x